

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, , Hukum Tata Negara, Jakarta Ghalia Indonesia, 1984.

Adinda Ayu Shabrina, Peran United Nations High Commisioner for Refugee (UNHCR) dalam menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) di Lebanon, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 1, 2018, hal.81-89, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses pada tanggal 16 November 2018.

Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, 2007 Akademika Pressindo.

Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT. BIP.

----- . 2006. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Pres.

Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006.

Budimansyah, Dasim. 2009. Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta.

Christian Charles, Hamidi Jazim. 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Daud Busroh, Abu dan Busro Abubakar. 1984. Hukum Tata Negara. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Dina Martiany, Penanganan Pengungsi Perempuan, Info Singkat Vol. VII, No. 14/II/P3DI/Juli/2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009

El Muhtaj, Majda. 2013. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Farida, Ike. 2016. Kewarganegaraan Di Indonesia. Jakarta: UI Press.

Gautama, MS. 1987. Warga Negara dan Orang Asing. Bandung: Penerbit Alumni.

Hardi Alunaza S.D, M. Kholit Juani, Kebijakan Pemerintah Melalui Sekuritas Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2012-2015, Indonesian perspective : Vol 2, No.1 (Januari-Juni 2017) : 1-17.

Henrichard Jordy Sunkudon, Michael Mamentu, Trilke Tulung, Peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia, EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No.1, 2018.

Intan Soeparna, The Protection of Women Refugees Based on the Perspective of ASEAN Law : The Case of Rohingya Women Refugees, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.2 (2018).

Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

Kansil, CST, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Kusnardi, Mohammad. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Sinar Bakti.

M. Hadjon, Philipus 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu.

Muchsin, 2006, Ikhtisar Ilmu Hukum, Jakarta, Badan Penerbit Iblam.

Rosmawati, Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.67 Th.XVII, 2015.

Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Qamar, Nurul. 2013. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Triwulan Tutik, Titik. 2006. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta, Sinar Grafika.

Wahjono, Padmo. 1984. Beberapa Masalah Kewarganegaraan di Indonesia. Jakarta: Rajawali.

Wijayanti, Herlin. 2011. Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian. Malang: Bayumedia Publishing.

Wennas Kenny Kevin, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia, Lex Crimen menurut Konvensi PBB 1951 dan protokol 1967, Lex Crimen Vol.VI/No.8/2017.

B. Jurnal

Abrar C.R. (2012), Repatriation of Rohingya Refugees, Dhaka : Refugee and Migratory Movement Research Unit.

Alam, M.A. (2011), Marginalization of the Rohingya in Arakan State of Western Burma, BIAS.

Ardani, F.A. (2015), Kebijakan Indonesia dalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono), Semarang : Journal of International Relations.

Adriaan Bedner & Stijn Van Huis, 2010. "Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism". Utrecht Law Review. Vol. 6. No. 2. Netherlands: Leiden University.

A. Amrullah Armansyah, dkk.,. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. *Pleno Jure*. Vol. 9. 2019.

Agung Sulistyo Purnomo. Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pembiaran Orang dengan Status 'Stateless' di Indonesia (Studi Kasus: Danko Nizar Zlavic). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. Vol. 2. No. 1. 2019.

Asih Saraswati. Convention Relating to the Status of Stateless Persons. *Jurnal Hukum Internasional*. Vol.2 No. 1. 2004.

Amalia, Rafika. *Perkawinan campuran dalam kaitannya dengan undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian*, *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Asep Kurnia, 2012, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

_____, (2012). *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan, dan Koordinasi di Indonesia*. Jakarta: International Organization for Migration.

Bakarbessy, Leonora, Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, Perspektif volume XVII No. 1 Tahun 2012, Januari, Universitas Airlangga.

Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Blitz, Brad K, (2010), *Refugee in Burma, Malaysia and Thailand: Rescue for the Rohingya*, Royal Institute of International Affairs: Jstor.

C.S.T. Kansil, 1996, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, dan Christine S.T., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (edisi Revisi)*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.

David Weissbrodt , Clay Collin, *The Human Rights of Stateless Person*, Human Rights Quarterly, Vol. 28, John Hopkins University Press, 2006

Diana Nining Nur, 2014, “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaran (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status Of Stateless Person 1954”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.

Dharmabrata, Wahyono, Prof., Dr., S. H., *Undang-Undang Perkawinan, UUP Mengenai Pengaturan Dan Masalah Yang Perlu Diperhatikan*, Pidato

Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Perdata di Universitas Indonesia, Jakarta, Depok, 2003.

Gatot Supramono. Hukum Orang Asing di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Gerdha Prastica Pangestu, 2014. “Studi tentang perkawinan campuran antara warga negara Malaysia- Indonesia”.Gloria Yuris. Vol. 3. No. 1. Pontianak: Untan.

Grossman, J.B, (2015), *Illegal Immigrants and Domestic Employment*, Sage Publication.

Hartati, A.Y, (2013), *Studi eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar*, Semarang : Jurnal Hubungan Internasional Wahid Hasyim.

Indra Tektona, Rahmadi. 2011. *Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Pernikahan Campuran di Indonesia (Perspektif Socio-Legal)*, Jurnal Muwazah, Vol. 3/No. 2, dalam <http://ejournal.stainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/267/0>, diakses 23 Maret 2021.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan 1, Konstitusi Press, Jakarta.

Kurniawan Nalom, 2017, “Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum.<https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/537>.

Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Laurensius Mamahit, 2013. "Hak dan kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran". Lex Privatum. Vol.1. No 1. Manado: Unsrat.

Lewa Chris, 2008, North Arakan: an open Prison for the Rohingya in Burma, Forced Migration Review, Volume 32, Refugee Studies Centre University of Oxford, London.

Leonora Bakarbesy, 2012. "Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata Internasional". Perspektif. Vol. 17. No. 1. Surabaya: UNAIR.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Marilyn Achiron. Nationality and Statelessness: A Handbook for Parliamentarians. Centrales de Lausanne. Switzerland. 2005.

M. Alvi Syahrin. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic. Jurnal Fiat Justicia, Vol. 3, No. 2. 2017.

M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung: Alumni, 2001

M. Nur Kholis Al Amin, 2016. "Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum: antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia". Al Amin. Vol. 9. No. 2. Jakarta: UIN.

Nasitah, Dewi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.Tl), Jurnal Hukum, Tahun 2016.

Pramono, Aris, 2010, *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya Di Bangladesh Periode (1978-2002)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Priandena, Anugerah G, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran, Jurnal Jurisprudence, vol. 4, No.1 Tahun 2014.

Prinst Darwan, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.

Ramadhani, Bayu Azhari.. *Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2012*. Skripsi. Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah Jakarta, 2014.

Shanty Delllyana, *Wanita dan anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988

- Setyardi, Heribertus U. Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Sosial. 2001. Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 1997. Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, 1982.
- Soetojo Prawirahamidjojo.. Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Jakarta, 1986
- Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1984
- Sugeng Istanto. Hukum Internasional Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Cet. 5. 2018.
- Satria, Novante & Ahmad Jamaan, (2013), Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam Konflik di Rakine, Myanmar, Riau :Jurnal Transnasional.
- Sadiq, Kamal, (2005), When States Prefer Non-Citizens over Citizens: Conflict over Illegal Immigration into Malaysia, International Studies Association : Jstor.
- Sulihyantoro, A.B & Cyntia Putri, (2012), Konstruksi Media Kompas On-line terhadap Peristiwa Pengungsi Rohingya, Surakarta: Jurnal Komunikasi Massa.

Thotowi, Jawahir, (2013), Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional, Yogyakarta: Pandecta.

Tamia Dian Ayu Faniati, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie) dan Prasetyadji, 2008, Tionghoa dalam Cengraman SBKRI, Visimedia, Jakarta.

Widodo Ekatjahjana. Masalah Kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Vol. 2., No. 3. 2010.

-----, 2009, Hukum Kewarganegaraan Indonesia (Sebuah Pengantar Singkat), Pustaka Sutra, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

-----, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

-----, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).

Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954

Rome Statute of The International Criminal Court 1998

Universal Declaration of Human Rights 1948

Konvensi Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961.

Konvensi Hak Anak Tahun 1989.